

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku/Literatur

- Amirrudin., Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- C.F.E. Rompas. 2011. Ekologi Megapoda Maluku (Burung Momoa, Eulipoa Wallacei) di Pulau Haruku dan Beberapa Pulau di Maluku, Indonesia. C.J. Heij. Rotterdam.
- Damanik, Riza, Budiarti Prasetyamartati, dan Arif Satria. 2006. *Menuju Konservasi yang Pro Rakyat dan Pro Lingkungan*. WALHI. Jakarta.
- Eliza Kissya. 1993. *Sasi AMAN Haruku (Tradisi Kelola Sumberdaya Alam Lestari di Haruku)*. Yayasan Sejati. Jakarta.
- Erwin, Muhammad. 2008. *Hukum Lingkungan dalam Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*. PT Refika Aditama. Bandung.
- Fajar, Mukti., Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- Gordon, Iain J.. 2009. *The Vicuna: The Theory and Practice of Community Based Wildlife Management*. Springer. New York.
- Hardjasoemantri. 1993. *Hukum Perlindungan Lingkungan: Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.
- Mishra, Charudutt. 2016. *The PARTNERS Principles for Community Based Conservation*. Snow Leopard Trust. Seattle.
- Norris, Ken., Deborah J. Pain. 2002. *Conserving Bird Biodiversity: General Principles and Their Application*. Cambridge University Press. United Kingdom.
- Ronny Hanityo Sumitro. 1985. *Metodologi Penelitian Hukum*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono., Sri Mamjudi. 2003. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan*. Raja Persada. Jakarta.

Simarmata, Rikardo., Bernadinus Steni. 2017. *Masyarakat Hukum Adat Sebagai Subjek Hukum: Kecakapan Hukum Masyarakat Hukum Adat dalam lapangan Hukum PRivat dan Publik*. The Samdhana Institute. Bogor.

Stevens, Stan. 1997. *Conservation Through Cultural Survival (Indigenous Peoples and Protected Areas)*. Island Press. Washington D.C.

Western, David., R. Michael Wright. 1994. *Natural Connections: Prespectives in Community-based Conservation*. Island Press. Washington D.C..

Wiratno. 2018. *Sepuluh Cara (Baru) Mengelola Kawasan Konservasi: Membangun Learning Organization*. Direktorat Jenderal KSDAE. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Wiryani. Fifik. 2009. *Reformasi hak Ulayat: Pengaturan Hak-Hak Masyarakat Adat dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam*. Setara Press. Malang.

B. Jurnal, Artikel, Makalah, Majalah, Koran dan Sumber Lainnya

Arizona, Yance., dkk.. 2017. *Outlook Epistema: Pengakuan Hukum Terhadap Masyarakat Adat: Tren Produk Hukum Daerah dan Nasional Pasca Putusan MK 35/PUU-X/2012*. Epistema. Jakarta.

Eric, Garraway., John Parnell, dkk. 2017. *Case Report: Successful Community-Based Conservation: The Story of Millbank and Pterourus (Papilio) Humerus*. MDPI Insects. Volume 8 Number 69.

Revalda A.Y.B. Salakory, 2016, *Pengembangan Ekowisata Berbasis Masyarakat di Kepulauan Banda Kabupaten Maluku Tengah*, Jurnal Ilmu Pertanian “Agrika”, Volume 10, Nomor 1.

Ristianasari, dkk.. 2013. *Dampak Program Pemberdayaan Model Desa Konservasi Terhadap Kemandirian Masyarakat: Kasus di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Lampung*. Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan Volume 10 Nomor 3.

Maman Rachman. 2012. *Konservasi nilai dan Warisan Budaya*. Indonesian Journal of Conservation Volume 1 Nomor 1.

Mansoben, J.R.. 2009. *Konservasi Sumber Daya Alam Papua Ditinjau dari*

Aspek Budaya, Antropologi Papua, Vol. 2 No.4.

Manullang, Sastrawan. 1999. *Kesepakatan Konsevasi Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi*. Departemen Kehutanan dan Perkebunan. Jakarta.

Zulkifli. 2008. *Dinamika Komunitas Meiofauna Interstisial di Perairan Selat Dompok Kepulauan Riau*. Tesis,. Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. Bogor.

C. Internet

Ambari, M. “Peran Masyarakat Adat di Wilayah Pesisir Sangat Penting, Seperti Apa?”. 2017. <http://www.mongabay.co.id/2017/09/06/peran-masyarakat-adat-di-wilayah-pesisir-sangat-penting-seperti-apa/>

Anggita Muslimah. 2017. “Tak Hanya Tempat Wisata, Kalibiru Jadi Lapangan Kerja untuk Penduduk Sekitar”. <https://travel.kompas.com/read/2017/11/08/200600127/tak-hanya-tempat-wisata-kalibiru-jadi-lapangan-kerja-untuk-penduduk-sekitary>

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN). Tanpa tahun. “Tentang AMAN”. <http://www.aman.or.id/>

Anonim. 2015. “(Siaran Pers) Perjuangan 9 tahun: Lahirnya Perda Kasepuhan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak”, <http://rmibogor.id/2015/11/19/perjuangan-9-tahun-lahirnya-perda-kasepuhan-oleh-pemerintah-kabupaten-lebak/>

Anonim. 2010. “Indonesia Membutuhkan Peraturan Perundangan Konservasi yang Lebih Komprehensif”, <https://www.wwf.or.id/?19682/indonesia-membutuhkan-peraturan-perundangan-konservasi-yang-lebih-komprehensif>

Anonim, 2018, “Diskusi Konsep Kemitraan Konservasi dalam Perdirjen KSDAE”, <https://fkkm.org/2018/01/12/diskusi-konsep-kemitraan-konservasi-dalam-perdirjen-ksdae>

Anonim. “Kondisi Keanekaragaman Hayati Indonesia Memburuk”. 2016. <http://www.greeners.co/berita/kondisi-keanekaragaman-hayati-indonesia-memburuk/>.

Anonim. “Sasi”. 2016. ”, <https://budaya-indonesia.org/Sasi-1>

- Anonim. 2012,. “Walikota Ambon Lantik 120 Kewang Lingkungan Hidup”,
<https://indonesiatimur.co/2012/09/07/walikota-ambon-lantik-120-kewang-lingkungan-hidup/>
- Anshori, Luthfi. “Sekjen AMAN: Masyarakat Adat Adalah Pengelola Kawasan Konservasi”. 2016. <http://fkkm.org/2016/01/16/sekjen-aman-masyarakat-adat-adalah-pengelola-kawasan-konservasi/>
- Badan Registrasi Wilayah Adat, “Wilayah Adat Negeri Haruku”,
<http://brwa.or.id/wa/view/LS03eTRQN05Odzg>
- Burung Indonesia. “Sejarah Burung Indonesia”.
<http://www.burung.org/tentang-kami/sejarah/>
- Busro, Adhin. “Fakta Kekayaan Alam Indonesia”. 2012.
<http://www.greeners.co/berita/kondisi-keanekaragaman-hayati-indonesia-memburuk/>
- Frans Sarong, 2012, “Sengketa Tapal Batas TWA Ruteng”,
<https://regional.kompas.com/read/2012/11/11/15160093/Sengketa.Tapal.Batas.TWA.Ruteng>
- INSISTPress. 2004. “Baileo Maluku”.
<http://insistpress.com/2004/05/29/baileo-maluku/>
- Nusa Batara Tara. 2015. “Perjuangan Elizza Kisya Untuk Negeri Hauruku:”,
<http://gaung.aman.or.id/2015/07/29/perjuangan-elizza-kisya-untuk-negeri-haruku/>
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2018. “Rancangan Peraturan Menteri LHK tentang Pedoman Perlindungan Kawasan Ekosistem”.
[http://puspijak.org/upload_files/Pedoman Perlindungan KEE DAN A BKT.pdf](http://puspijak.org/upload_files/Pedoman%20Perlindungan%20KEE%20DAN%20A%20BKT.pdf),
- Lusia Arumingtyas. 2018. “Cerita dari Kasepuhan Karang Pasca Penetapan Hutan Adat”, <http://www.mongabay.co.id/2018/01/14/cerita-dari-kasepuhan-karang-pasca-penetapan-hutan-adat/>
- Subekti, Sabar. 2014. “Gosong Maluku Unggas Berkaki Besar”.
<http://www.satuharapan.com/read-detail/read/gosong-maluku-unggas-berkaki-besar>

Sigit, Ridzki R. 2015. “Burung Gosong, Inilah Kerabat Maleo dari Maluku” .
<http://www.mongabay.co.id/2015/12/13/burung-gosong-inilah-kerabat-maleo-dari-maluku/>

Soemarno. 2011. “Model Desa Konservasi”,
marno.lecture.ub.ac.id/files/2012/01/MODEL-DESA-KONSERVASI.docx ,

Tihulale, Negeri. 2017. “Sasi Tradisi Menjaga Sumber Daya”
<http://www.tihulale.com/2017/03/sasi-tradisi-menjaga-sumber-daya.html>

Trisulistiwaty, Endah. 2016. “Revisi Undang-undang Konservasi untuk Membuka Peran Masyarakat”.
<http://nationalgeographic.grid.id/read/13303333/revisi-undang-undang-konservasi-untuk-membuka-peran-masyarakat>

www.cites.org

www.iucnredlist.org

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang Nomor 5 tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Convention on Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati)

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1994 tentang Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan masyarakat Hukum Adat Kasepuhan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam

Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Negeri

Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.

Rancangan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pedoman Perlindungan Kawasan Ekosistem Esensial

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19/Menhut-II/2005 tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 34/MenLHK/SETJEN/KUM.1/5/2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.43/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.

Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor: P.3 KSDAE/SET/KUM.1/5/2017 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah dalam Rangka Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Lingkup Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P/18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/Menlhk-Setjen/2015 tentang Hutan Hak.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa

Peraturan Menteri Keautan dan Perikanan Nomor Per.17/MEN/2008 (Permen KKP No 14 Tahun 1008) tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK/678/MENLHK-PSKL/KUM.1/12/2016 tentang Penetapan Hutan Adat Kasepuhan Karang seluas ± 462 (Empat Ratus Enam Puluh Dua) Hektar di Desa Jagaraksa Kecamatan Munvang Kabupaten Lebak Provinsi Banten.

The United Nation Convention On Biological Diversity (CBD) atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Keanekaragaman Hayati

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012

E. Dokumen

Achmad Santosa, dkk., (Technical Report) Kajian Hukum dan Kebijakan Pengelolaan Kawasan Konservasi di Indonesia: Menuju Pengembangan Desentralisasi dan Peningkatan Peranserta Masyarakat. Indonesian Center for Environmental Law (ICEL).

Dirjen KSDAE Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2018. Statistik Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Tahun 2017. Jakarta.

Perlindungan Ekosistem Pesisir Berbasis Kearifan Sasi di Desa Haruku, Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah (Laporan Akhir Program periode 1 Februari 2016 – 31 Januari 2017), Yayasan Baileo Maluku, 2017

F. Wawancara

Wawancara dengan Eliza Kissya, Kepala Kewang Desa Haruku

Wawancara dengan Vincentia Widyasati, Maluku Inter-Island Partnership
Coordinator Burung Indonesia

Wawancara dengan Nus Ukru, Ketua Yayasan Baileo Maluku

Wawancara dengan Zefnat Ferdinandus, Raja Negeri Haruku sekaligus Kepala
Negeri atau Kepala Desa Haruku

Wawancara dengan James Abraham, Ahli Kemaritiman Universitas Perikanan
dan Ilmu Kelautan Universitas Pattimura

Wawancara dengan Franciska Yosi, Staff Seksi Tenurial dan Hutan Adat BPSKL
Maluku Papua

Wawancara dengan Suharto Ismail, Kepala Sub Bagian Tata Usaha Balai
Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA)

Wawancara dengan Ayu Diyah Setiyani dan Budi Wardi Ansah, Penyuluh
Kehutanan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Maluku

Wawancara dengan Vitor Saiya, Staf Sub Bagian Perundang-Undangan Bagian
Hukum Sekretarian Daerah Maluku Tengah